

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ada maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia adalah faktor ekonomi yang kemudian memicu berbagai ancaman nonmiliter pada dimensi lainnya. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan pengamanan perbatasan sekaligus pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter berdimensi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Kalbar-Malaysia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah melaksanakan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan berupa PLBN, pasar, terminal, dan jalan, namun masih minim.
2. K/L belum siap dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia. Konsepsi pertahanan nirmiliter hingga saat ini masih belum jelas. Dari aspek kelembagaan, K/L di luar bidang pertahanan hanya menjalankan tupoksi sehingga SDM digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, bukan secara spesifik untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Hal ini mengakibatkan tingginya peran yang harus diemban TNI dalam menghadapi ancaman nonmiliter di perbatasan darat Kalbar-Malaysia.
3. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemhan dalam mendorong terwujudnya pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia belum maksimal karena berbagai kebijakan tersebut belum tersinergi dengan K/L di luar bidang pertahanan. Jakumhaneg yang selama ini disusun setiap 5

tahun sekali tidak pernah diturunkan oleh K/L di luar bidang pertahanan

ke dalam program kerja K/L maupun kebijakan internal lainnya. Di luar hal-hal tersebut diatas, belum terbentuknya DPN menjadi salah satu hambatan terkait kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

## **5.2 Rekomendasi**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada Pemerintah terkait ancaman nonmiliter berdimensi ekonomi yang oleh peneliti disebut sebagai ancaman primer di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, akan berimbas pada dimensi sosial budaya, politik, teknologi, dan legislasi yang pada akhirnya akan berujung pada ancaman keselamatan umum dan ideologi sehingga harus segera diatasi oleh K/L terkait. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan kelembagaan serta sinergitas semua unsur K/L yang ada di wilayah perbatasan. Pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter harus segera diwujudkan mengingat semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Rekomendasi kepada Pemerintah adalah Jakumhaneg diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang salah satunya adalah peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara secara nirmiliter. Sosialisasi terhadap Jakumhaneg ini harus segera dilakukan secara masif baik melalui media cetak, media online, media sosial dan sarana lain yang memungkinkan diseminasi pesan mengingat situasi akhir-akhir ini sering terjadi ancaman nonmiliter berskala besar seperti misalnya

pandemi Covid-19. Perumusan kebijakan pertahanan perlu melibatkan K/L di luar bidang pertahanan mulai dari proses penyusunan draf sampai dengan tahap implementasi sehingga tidak ada produk Undang-Undang atau peraturan yang tidak dipahami oleh K/L. Dengan demikian diharapkan K/L dan Pemda akan semakin siap menghadapi ancaman nonmiliter dalam segala dimensi.

Penguatan BNPP sebagai *leading sector* di wilayah perbatasan perlu diwujudkan melalui peningkatan peran khususnya terkait dengan pembangunan pertahanan nirmiliter. Hal ini dilaksanakan melalui pelaksanaan analisis terhadap ancaman nonmiliter, melakukan klasifikasi dimensi ancaman, dan merekomendasikan aksi tindak lanjut kepada K/L terkait dan Pemda Kalbar. Peran lain yang dapat diserahkan kepada BNPP di Kalbar diantaranya adalah sosialisasi mengenai perbatasan darat, kegiatan pengendalian kegiatan K/L yang ada di perbatasan, mensinergikan kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh beberapa K/L.

Terkait dengan mobilisasi dan demobilisasi personil pertahanan nirmiliter, dibutuhkan suatu mekanisme melalui pembangunan sistem informasi pengelolaan sumber daya pertahanan nirmiliter di masing-masing K/L berupa database personil yang salah satunya berisikan data terkait keahlian atau profesi untuk dilibatkan sesuai dengan jenis ancaman yang dihadapi.

3. Peneliti merekomendasikan agar Presiden segera membentuk Dewan Pertahanan Nasional sehingga pertahanan militer maupun nirmiliter dapat berjalan maksimal. Diperlukan ketegasan Presiden terkait pertahanan nirmiliter sehingga seluruh K/L dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan dimensi ancaman nonmiliter yang dihadapi. Presiden disarankan untuk memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan Jakumhaneg 2020-2024.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini secara komprehensif terkait perspektif masing-masing K/L

terhadap ancaman nonmiliter maupun pertahanan nirmiliter. Aspek lain yang dapat diteliti lebih lanjut adalah pelebagaan dan upaya K/L mewujudkan pertahanan nirmiliter.